

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi (TI) mengalami peningkatan yang pesat dalam bidang kehidupan yang mempengaruhi kepada segala kegiatan atau aktivitas. Teknologi informasi adalah suatu penawaran kemampuan pada organisasi atau instansi maupun perusahaan melalui komputer. Contoh pemanfaatan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut berupa perangkat lunak dan aplikasi telekomunikasi yang memberikan informasi, data, dan pengetahuan kepada individu adalah dengan teknologi berbasis web. Teknologi ini saat ini digunakan oleh pemerintah dengan nama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nabilah et al. 2021). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe.co.id, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah menerapkan SPBE dan mempunyai hasil yang mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya, pemerintahan daerah atau instansi daerah yang sudah melaksanakan atau menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah DISKOMINFO Purwakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Purwakarta ini merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistic (INFORMATIKA, n.d.) (SPBE, n.d.).

DISKOMINFO Purwakarta menerapkan beberapa domain salah satunya adalah domain infrastruktur. Untuk infrastruktur SPBE itu menggunakan beberapa perangkat atau aplikasi umum dan digunakan oleh instansi pusat dan pemerintahan daerah yang bertujuan agar aplikasi terkelola dengan baik dan berkelanjutan karena hal tersebut adalah aplikasi khusus untuk instansi pusat dan pemerintah daerah . Hal ini tertera pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018.

Pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai visi misi, Adapun Penjelasan dari Visi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” (Csr.Purwakartakab.co.id, n.d.) dengan tujuan tersebut pemerintahan kabupaten purwakarta berencana mengembangkan sistem IT untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi (Rizky 2020).

Lebih lanjut untuk melihat indikator kinerja utama Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dapat di lihat di dokumen indikator “Kinerja Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023” masih ada beberapa indikator kinerja yang di harapkan menyentuh target dan masih ada beberapa yang dalam tahap pengembangan dan tercatat pada dokumen “Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023” Target infrastruktur pada tahun 2019 tercatat 40% dan target yang di harapkan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta di DISKOMINFO Purwakarta dengan terlaksananya SPBE dengan domain infrasuktur di tahun 2023 adalah 80% (Ix 2013). Agar SPBE bisa berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan penilaian dan evaluasi secara terpola guna mengetahui sejauh mana kemajuan aplikasi SPBE disetiap Instansi Pusat & Pemerintah Daerah, pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas 2 pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi

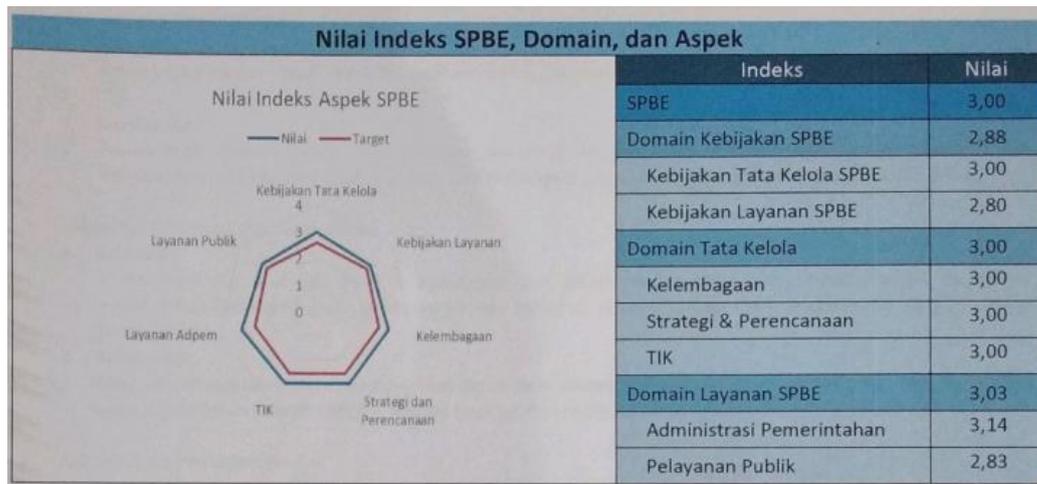
Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat penilaian predikat indeks dengan nilai dan predikat sesuai dengan Tabel I-1. Indeks Nilai dan Predikat SPBE (AYWANDARI 2021).

Tabel I-1 Indeks dan Predikat

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Permen PANRB No.5 tahun 2018

Provinsi Jawa Barat ini sudah banyak daerah yang menerapkan atau menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), salah satunya adalah kota purwakarta. Jika dilihat pada Gambar I.1 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Purwakarta hanya 3,00 dengan predikat baik serta pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya mendapatkan nilai 3.00 Kabupaten Purwakarta mempunyai keinginan lebih optimal dalam penggunaan spbe nya dengan permasalahan utamanya adalah isu strategis pada RPJMD Kabupaten Purwakarta yaitu sarana prasarana untuk pengembangan teknologi informasi belum memadai dan kurang cukup optimal penggunaan SPBE pada pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi SPBE.



Gambar I-1 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan latar belakang diatas memerlukan perancangan *Enterprise Architecture* (EA) pada domain infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam rangka peningkatan penggunaan SPBE di lingkungan tersebut, EA ini dapat dikatakan sebagai suatu logika organisasi proses bisnis dan infrastruktur TI yang dapat yang mencerminkan suatu persyaratan integrasi dan standarisasi pada model operasi organisasi. perancangan EA pada domain infrastruktur tersebut dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi SPBE serta menjamin suatu kontrol keamanan agar dapat melindungi aset informasi di Kabupaten Purwakarta dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi yang berkepentingan sesuai dengan SNI ISO/IEC 27001, perancangan menggunakan best practice TOGAF ADM diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan teknologi informasi agar menjadi lebih memadai dan dapat meningkatkan optimalisasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (AYWANDARI 2021).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana gambaran Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan gambaran arsitektur domain infrastruktur pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

I.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini, Yaitu meliputi:

1. Pengembangan arsitektur *enterprise* menggunakan kombinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan berbasis *Framework* TOGAF ADM.
2. Data perancangan *Enterprise Architecture* mengacu pada dokumen “Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023”
3. Data terkait catalog technology, topologi jaringan, berdasarkan kondisi eksisting.

I.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini, jelaskan apa manfaat yang diperoleh jika penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian harus memperhitungkan pihak yang terkait dengan konteks penelitian seperti organisasi, komunitas atau peneliti serupa. Manfaat penelitian ini:

1. Memberikan usulan atau arahan diskominfo Purwakarta sehingga mempermudah proses pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
2. Memberikan pengetahuan-pengetahuan yang dapat dipahami dan dijadikan referensi sebagai perencanaan *Enterprise Architecture* sesuai visi dan misi pada penelitian selanjutnya.
3. Membantu diskominfo Purwakarta dalam menentukan teknologi yang akan dikembangkan untuk menunjang sistem informasi yang akan dibangun.